

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT  
KOMISI II DPR RI**  
**(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)**

---

Tahun Sidang	: 2012-2013
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu/13 Februari 2013
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: A. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 (per 31 Desember 2012) B. Rencana aksi pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2013 C. Evaluasi terhadap kinerja 11 Tim BPN dan progress penyelesaian kasus dan sengketa pertanahan.
Ketua Rapat	: Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sagung Agung Putu Sy.SH,MH/Lakhar Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. <b>Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI beserta jajarannya.</b> B. 31 dari jumlah 45 Anggota Komisi II DPR RI

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 dibuka pukul 09.45 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPN RI beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012, rencana aksi pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2013, dan evaluasi terhadap kinerja 11 Tim BPN dan progress penyelesaian kasus dan sengketa pertanahan.
3. Kepala BPN RI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
  - A. Dalam rangka meningkatkan percepatan pelayanan pertanahan, telah diterbitkan Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan

Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

- B. Terkait dengan optimalisasi pemanfaatan PNB, BPN RI telah mengusulkan ke Menteri Keuangan dan Bappenas untuk melakukan penyempurnaan mekanisme pengelolaan dana PNB yang diberlakukan di lingkungan BPN RI dengan prinsip dapat dilakukan subsidi silang antar satuan kerja dengan prioritas untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik.
- C. Pelaksanaan kegiatan legalisasi asset khususnya Prona yang dibiayai melalui dana APBN yang bersumber dari Rupiah Murni, meliputi Biaya Penyuluhan, Pengumpulan Data, Pengukuran, Panitia Pemeriksaan Tanah, Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Pendaftaran dan Penerbitan Sertipikat. Sedangkan biaya pemberkasan (alas hak), biaya materai, patok, Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat keterangan Tidak Sengketa, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak dibiayai dari APBN. Untuk tahun anggaran 2014 diusulkan agar semua biaya-biaya tersebut diatas dapat dianggarkan dalam APBN.
- D. Terkait dengan masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan, BPN RI selalu menindaklanjuti setiap kasus-kasus pertanahan yang dilaporkan masyarakat kepada BPN RI. Adapun tindak lanjut penanganan kasus-kasus yang disampaikan dilakukan sesuai dengan tipologi kasus yang ada serta berdasarkan hukum dan prosedur penanganan hukum yang berlaku. Kemudian khusus mengenai sengketa-sengketa yang terkait dengan asset Negara (BMN/D, BUMN/D) memerlukan pelepasan asset sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi II DPR RI meminta kepada Badan Pertanahan Nasional untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Tahun 2013, sehingga tingkat penyerapan anggaran Badan Pertanahan Nasional pada Tahun 2013 dapat lebih ditingkatkan dibandingkan tingkat penyerapan Tahun Anggaran 2012 yang sebesar 76,94% (Rp2.986.260.428.000,- dari Rp3.881.135.536.000,-).
2. Terkait dengan program sertifikasi tanah untuk masyarakat, Komisi II DPR RI meminta BPN untuk meningkatkan kinerjanya baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan serta melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi-instansi terkait agar pencapaian dari program-program tersebut bisa lebih dioptimalkan. Komisi II DPR RI juga meminta kepada BPN agar dalam pelaksanaan program sertifikasi tersebut, lebih meningkatkan pengawasannya untuk menghindari adanya pungutan-pungutan yang melanggar aturan.
3. Komisi II DPR RI meminta kepada BPN untuk melakukan langkah-langkah strategis, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat banyak dan yang termasuk dalam agenda 11 TIM BPN yang akan diselesaikan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, yang akan dibahas lebih lanjut dengan Panja Penyelesaian Konflik dan Sengketa Pertanahan Komisi II DPR RI. Proses penyelesaian sengketa tersebut agar memperhatikan Tap MPR Nomor IX Tahun 2001.

4. Komisi II DPR RI mendorong BPN untuk segera melakukan legalisasi terhadap aset-aset yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dan tidak mendapatkan gugatan dari pihak manapun, sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, sesuai dengan Pasal 15 PP Nomor 11 Tahun 2010.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup Pukul 13.05 WIB.

**KETUA RAPAT,**

ttd

**Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si**  
**A-126**